PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TUGAS AKHIR

Dimas Eko Putranto

NIM B1011221238

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Dimas Eko Putranto
NIM	:	B1011221238
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat padapembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.
Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 14 September 2026

Dimas Eko Putranto
NIM. B1011221238

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Dimas Eko Putranto
NIM	:	B1011221238
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir	:	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 14 September 2026

Dimas Eko Putranto
NIM. B1011221238

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Penanggung Jawab Yuridis

Dimas Eko Putranto
B1011221238

Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA)	:	29 Juli 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Romi Suradi, S.E.I., M.E.	14/9-2026	
		NIP 198610022019031004		
2.	Ketua Penguji	Dr. Hendarmin, S.E., M.Si.	7/9-26	
		NIP 197705092005011003		
3.	Anggota Penguji	Farah J. Meutianingrum, SE, MEc.Dev	7/9-2026	
		NIP 199406242024062003		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 15 SEP 2026

Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP. 197706152003121004

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir (TA) mahasiswa :

Nama	: Dimas Eko Putranto
NIM	: B1011221238
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Tugas Akhir (TA)	: **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat**

Menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.

	Nama/ NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Tugas Akhir	Romi Suradi, S.E.I, M.E. NIP. 198610022019031004	20/07/2026	

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul "PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT". Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serata semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan tulisan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Allah SWT atas segala kasih, rahmat, dan penyertaan-Nya yang tidak pernah terputus dalam setiap langkah penulis. Di tengah berbagai pergumulan, kekhawatiran, dan perjuangan selama proses penyusunan tugas akhir ini, Allah SWT senantiasa menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan harapan. Penulis meyakini bahwa setiap kemudahan yang diperoleh merupakan bentuk pertolongan dan kehendak-Nya. Semoga karya ini dapat menjadi persembahan kecil yang bernilai ibadah dan diridhai oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku rektor Universitas Tanjungpura periode 2023-2027
3. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E., M.sc., CSRS., CfrA., CAPM., CAPF. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Bapak Yanto, S.E, M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Bapak Romi Suradi, S.E.I, M.E, selaku dosen pembimbing yang luar biasa baik dan penuh perhatian. Terima kasih yang setulusnya penulis sampaikan atas kesabaran, kebaikan hati, serta bimbingan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Kebaikan Bapak sungguh berarti dan akan selalu penulis kenang.
7. Bapak Dr. Hendarmin, S.E., M.Si. selaku dosen penguji pertama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini.
8. Ibu Farah J. Meutianingrum, SE, MEc.Dev selaku dosen penguji kedua, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini.
9. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi penulis.
10. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak dan Mama yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta pengorbanan yang tak pernah putus senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun materi, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan tugas akhir ini. Segala nasihat, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.
11. Saudara penulis, yaitu Dita Kireybo yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis.

12. Keluarga penulis, yaitu Akung, Ibu, Uti, Om Pras, Tante Ana, Tante Kiki, Bulek wid serta seluruh keluarga besar yang tak dapat disebutkan satu per satu yang tak pernah putus senantiasa memberikan doa, dukungan moral maupun materi, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan tugas akhir ini. Segala nasihat, perhatian, dan kepercayaan yang diberikan menjadi kekuatan besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis sejak masa awal perkuliahan, yaitu Hugo, Angla, Isna, dan Fren, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta menemani saya selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini agar saya tidak cepat menyerah dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
14. Kepada sahabat-sahabat penulis anggota "WARNET" yaitu Cico, Adit, Bepe, Erik, Mario, Algy yang selalu memberi dukungan, semangat, dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
15. Kepada wanita bernama nisa, terima kasih telah menemani di setiap proses, mendengarkan setiap keluh kesah, dan memberi semangat ketika langkah terasa berat. Sederhana, tetapi kehadiranmu sangat berarti.

Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, baik sebagai referensi akademik maupun sebagai dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang, dengan harapan agar karya ini dapat menjadi tulisan yang lebih baik ke depannya.

Pontianak, 14 September 2026

Dimas Eko Putranto
NIM. B1011221238

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh: Dimas Eko Putranto

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Meningkatnya PAD akan memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Di Provinsi Kalimantan Barat, perkembangan PAD selama periode 2015–2024 menunjukkan fluktuasi, terutama akibat perlambatan ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghimpun pendapatan masih dipengaruhi oleh dinamika perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi diduga menjadi faktor yang mampu meningkatkan PAD melalui bertambahnya aktivitas ekonomi, sedangkan Belanja Daerah diharapkan dapat mendorong pembangunan dan pelayanan publik yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan daerah. Namun, peningkatan PDRB dan Belanja Daerah belum selalu diikuti oleh peningkatan PAD secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

2. Permasalahan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pola perkembangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024. Meskipun PDRB dan Belanja Daerah secara umum menunjukkan tren peningkatan, perkembangan PAD masih mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan peningkatan yang konsisten. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah belum tentu mampu meningkatkan PAD secara optimal. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai pengaruh PDRB dan Belanja Daerah terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh PDRB dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PDRB terhadap PAD, menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap PAD, serta mengetahui pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan Belanja Daerah secara lebih efektif.

4. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2015–2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD/SIKRI). Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews 14 melalui uji pemilihan model (Uji Chow dan Uji Hausman), uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, uji parsial (uji t), uji simultan (uji F), dan uji koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan hasil pengujian, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

5. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi mampu meningkatkan penerimaan daerah melalui bertambahnya basis pajak dan retribusi daerah. Sebaliknya, Belanja Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Temuan ini mengindikasikan bahwa alokasi Belanja Daerah belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor produktif yang mampu meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek. Secara simultan, PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Nilai Adjusted R-Squared sebesar 92,24% menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan sebagian besar variasi PAD, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

6. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara bersama-sama, PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pemerintah daerah disarankan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan agar mampu meningkatkan PAD. Selain itu, pengelolaan Belanja Daerah perlu lebih diarahkan pada sektor-sektor produktif yang dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan penerimaan daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain, seperti investasi, jumlah penduduk, pajak daerah, retribusi daerah, inflasi, atau jumlah wisatawan agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ii
UCAPAN TERIMA KASIH v
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK 1
1. PENDAHULUAN 2
2. TELAAH PUSTAKA 7
2.1 Landasan Teori 7
2.2 Tinjauan Empiris 7
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 9
3. METODE PENELITIAN 10
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 14
4.1 Hasil Penelitian 14
4.1.1 Uji Model 14
4.1.2 Uji Asumsi Klasik 14
4.1.3 Analisis Regresi Data Panel 15
4.1.5 Uji Signifikansi Individual (Uji t) 16
4.1.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 17
4.1.7 Uji koefisien determinasi (R^2) 17
4.2 Pembahasan 17
4.2.1 Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah 17
4.2.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 18
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 20
5.1 Kesimpulan 20
5.2 Rekomendasi 20
RUJUKAN PUSTAKA 21
LAMPIRAN 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 2
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 (Miliar Rupiah) 4
Tabel 3.Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (ribuan rupiah) 5
Tabel 4. Hasil Uji Pemilihan Model 14
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas 14
Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 15
Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi 15
Tabel 8. Hasil Estimasi Model Data Panel 15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual 10
Gambar 2. Uji Normalitas 14

PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

[1]Dimas Eko Putranto

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and regional expenditure on Locally-Generated Revenue (PAD) across regencies and cities in West Kalimantan Province during the 2015–2024 period. The study employs a quantitative approach using panel data, comprising time-series data from 2015 to 2024 and cross-sectional data from 14 regencies and cities in West Kalimantan Province. Secondary data were obtained from the West Kalimantan Province Central Statistics Agency (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). Analysis was conducted using panel data regression with the aid of EViews 14 software. Based on model selection test results, the Fixed Effect Model (FEM) was identified as the optimal model. The findings indicate that, individually, GRDP has a positive and significant effect on PAD, whereas regional expenditure has a negative and insignificant effect on PAD. Simultaneously, GRDP and regional expenditure have a significant effect on PAD. These results demonstrate that the increase in regional economic activity as reflected in GRDP is a primary factor in boosting PAD; conversely, the effectiveness of regional expenditure management requires improvement to enable a greater contribution toward enhancing regional fiscal independence.

Keywords: Locally-Generated Revenue (PAD), Gross Regional Domestic Product (GRDP), Regional Expenditure, Panel Data Regression.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang terdiri atas data time series tahun 2015–2024 dan data cross section dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat serta Direktorat Jendral Perkembangan Keuangan (DJPK). Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 14. Berdasarkan hasil uji pemilihan model, model terbaik yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Secara simultan, PDRB dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB merupakan faktor utama dalam meningkatkan PAD, sedangkan efektivitas pengelolaan Belanja Daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Belanja Daerah, Regresi Data Panel.

1. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Kobandaha & Wokas, 2016). Dengan meningkatnya PAD, pemerintah provinsi dapat menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial ekonomi secara lebih optimal. Di era desentralisasi dan otonomi daerah, peningkatan kemandirian fiskal daerah menjadi suatu keharusan agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan sesuai dengan potensi lokal. Pada Provinsi Kalimantan Barat, kondisi ekonomi, struktur demografi, serta kebijakan belanja daerah menjadi faktor yang sangat relevan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peningkatan PAD dalam era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakan dan mengelola sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal, kecuali untuk beberapa bidang tertentu seperti pertahanan, keamanan, hubungan luar negeri, dan moneter yang tetap menjadi kewenangan pusat (Amsyah & Sudardi, 2025). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali dan mengelola sumber-sumber PAD secara efektif agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Irwadi et al., 2024). Penerapan otonomi daerah tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi ekonomi yang dimiliki, termasuk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

Kalimantan Barat adalah provinsi di Indonesia yang terbagi menjadi 12 kabupaten dan 2 kota. Pada tahun 2024, provinsi ini mencakup total 174 kecamatan dan 2.151 desa/kelurahan. Dengan menerapkan struktur regional ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan daerah melalui otonomi daerah. Kewenangan ini bertujuan untuk memungkinkan pemerintah daerah mengelola sumber daya mereka secara mandiri dan meningkatkan kemandirian keuangan khususnya melalui optimalisasi pendapatan asli daerah. Berikut tabel yang menunjukan data pendapatan asli daerah provinsi Kalimantan barat 2015-2024.

Tabel 1. Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024

Kabupaten /Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sambas	129.676.504.956	148.139.103.733	167.639.410.304	230.889.069.498	229.120.841.940
Kabupaten Bengkayang	54.405.431.384	62.813.127.691	83.744.525.713	82.011.588.604	84.083.057.631
Kabupaten Landak	104.639.964.531	113.438.338.826	73.275.180.943	62.613.089.144	65.769.535.912
Kabupaten Mempawah	98.615.210.566	107.445.076.396	154.466.054.039	148.988.046.416	147.446.161.321
Kabupaten Sanggau	117.923.983.193	129.732.909.424	158.524.815.808	159.171.289.955	176.129.863.987
Kabupaten Ketapang	231.283.286.171	291.004.278.721	225.476.782.346	286.702.600.430	260.639.132.315

Kabupaten /Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sintang	134.829.357.444	176.520.346.650	162.366.717.402	172.973.442.068	179.044.685.320
Kabupaten Kapuas Hulu	79.165.077.924	78.657.172.951	70.668.853.866	73.407.843.893	92.298.147.127
Kabupaten Sekadau	46.978.872.151	45.142.191.528	55.332.244.001	67.029.293.417	58.799.759.009
Kabupaten Melawi	30.872.004.588	56.170.124.296	49.672.920.659	46.569.007.123	54.536.317.314
Kabupaten Kayong Utara	39.525.271.732	34.406.954.865	46.082.072.979	49.778.428.071	45.146.680.091
Kabupaten Kubu Raya	151.009.789.229	160.894.591.483	200.314.165.509	201.559.443.903	253.234.841.011
Kota Pontianak	403.176.698.953	413.401.936.270	537.797.747.855	574.760.971.716	593.775.839.763
Kota Singkawang	154.272.914.307	181.244.700.312	213.790.179.585	244.316.898.933	272.080.297.921

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2025

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2020–2024, Kota Pontianak secara konsisten menjadi daerah dengan PAD tertinggi. Pada tahun 2024 Kota Pontianak mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Tingginya PAD tersebut didukung oleh peran Kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan investasi. Kondisi tersebut mendorong tingginya aktivitas ekonomi sehingga penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, serta sumber-sumber PAD lainnya menjadi lebih besar.

Sebaliknya, Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah dengan PAD terendah selama periode penelitian. Meskipun PAD meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024, nilainya masih relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Rendahnya PAD Kabupaten Kayong Utara kemungkinan dipengaruhi oleh skala perekonomian yang lebih kecil, jumlah penduduk yang relatif sedikit, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber PAD lainnya masih terbatas.

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Juliansyah & Sulkadria, 2018). Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan nilai tambah total dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Indikator Pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi yang meningkat, struktur ekonomi yang kuat, dan perbedaan pendapatan antar penduduk yang rendah baik antar daerah maupun antar sektor perekonomian (Rosmadayanti et al., 2021). Peningkatan PDRB umumnya menunjukkan ekspansi aktivitas ekonomi, yang seharusnya meningkatkan potensi basis pajak karena semakin banyaknya transaksi ekonomi yang menjadi objek pemajakan.

Menurut Rizqan & Murtala (2024), peningkatan PDRB mencerminkan ekspansi aktivitas ekonomi yang dapat memperluas basis pajak (*tax base*) melalui meningkatnya produksi, konsumsi, transaksi usaha, dan pendapatan, sehingga berpotensi mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 (Miliar Rupiah)

Kabupaten /Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sambas	13.363,52	13.947,82	14.594,28	15.277,44	16.000,86
Kabupaten Bengkayang	5.600,32	5.842,93	6.161,45	6.449,88	6.755,97
Kabupaten Landak	6.972,05	7.312,56	7.652,01	7.988,20	8.351,06
Kabupaten Mempawah	5.251,04	5.466,32	5.723,03	6.014,54	6.412,73
Kabupaten Sanggau	13.235,26	13.790,45	14.425,58	14.719,80	15.328,48
Kabupaten Ketapang	17.911,87	18.848,70	19.869,76	20.088,15	21.070,69
Kabupaten Sintang	9.375,71	9.731,98	10.215,31	10.693,38	11.216,50
Kabupaten Kapuas Hulu	6.234,48	6.510,87	6.805,58	7.119,65	7.457,75
Kabupaten Sekadau	4.252,10	4.435,32	4.661,47	4.880,32	5.117,39
Kabupaten Melawi	3.348,11	3.500,14	3.671,61	3.838,95	4.021,65
Kabupaten Kayong Utara	2.517,55	2.633,24	2.765,56	2.889,47	3.019,94
Kabupaten Kubu Raya	17.831,73	18.754,97	19.772,49	20.757,80	21.794,06
Kota Pontianak	23.822,51	24.920,92	26.159,52	27.404,86	28.784,47
Kota Singkawang	6.657,05	6.977,77	7.324,63	7.694,93	8.084,58

Sumber:Badan Pusat Statistik 2025 (diolah)

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2020–2024 menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan PDRB tersebut mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kemampuan daerah dalam menghasilkan nilai tambah dari berbagai sektor ekonomi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota yang dipengaruhi oleh variasi potensi sumber daya, tingkat investasi, jumlah penduduk, serta perkembangan sektor-sektor ekonomi di masing-masing daerah. Namun, jika dibandingkan dengan perkembangan PAD terdapat adanya ketidaksesuaian di mana peningkatan PDRB tidak selalu diikuti oleh peningkatan PAD secara konsisten (Hartoyo et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi peningkatan penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak. Kondisi ini mencerminkan stabilitas perekonomian serta kemampuan daerah dalam menjaga kinerja ekonominya dalam kondisi yang terkendali.

Peningkatan PDRB juga mencerminkan bertambahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di daerah. Dengan memahami sejauh mana kontribusi dan pengaruh dari semua sektor, pemerintah daerah mampu membuat kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi (Arifiyanto et al., 2026). Secara umum, pola pertumbuhan yang stabil mencerminkan ekonomi daerah yang cukup kuat. Tren tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi perencanaan pembangunan ke depan, karena menunjukkan adanya kesinambungan pertumbuhan dan potensi untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan.

Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) menunjukkan seberapa baik kinerja ekonomi suatu daerah, seperti di Provinsi Kalimantan Barat, dan seberapa besar pertumbuhannya. PDRB menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh

berbagai macam kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam waktu tertentu. Dengan melihat data PDRB, kita dapat melihat seberapa baik suatu daerah menggunakan sumber daya ekonominya untuk membantu pembangunan. PDRB dapat diartikan sebagai nilai tambah total oleh semua bisnis di suatu wilayah tertentu. Selain itu, PDRB juga diartikan sebagai nilai keseluruhan barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap unit ekonomi di wilayah tersebut (Ahmad Rizky Kesuma et al., 2024).

Selain PDRB, faktor lain yang juga berperan dalam mempengaruhi penerimaan daerah adalah belanja daerah. Belanja daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan. Secara teoritis, peningkatan belanja daerah akan mendorong aktivitas ekonomi melalui efek pengganda (*multiplier effect*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas basis pajak daerah.

Belanja daerah digunakan untuk mendukung pekerjaan pemerintah di tingkat provinsi dan kota, mencakup tugas-tugas yang wajib dan opsional sebagaimana diatur dalam undang-undang (PP No. 58 tahun 2005). Pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai tugas pemerintah dan memberikan layanan kepada masyarakat dengan membelanjakan anggaran belanja daerah di wilayah tersebut. Selain itu, anggaran belanja daerah yang dibelanjakan di berbagai daerah menunjukkan apa yang menjadi fokus pemerintah daerah dan apa yang mereka anggap penting untuk pembangunan. Dengan uang yang dibelanjakan di berbagai daerah ini menunjukkan berapa banyak anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang menciptakan nilai, bukan hanya sekadar dihabiskan.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan penggunaan belanja daerah agar memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belanja daerah yang dialokasikan secara tepat, khususnya pada sektor-sektor produktif dan pelayanan publik, dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta mendorong partisipasi ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan PAD (Fajerin, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengeluaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Selain itu, Sugandi et al., (2024) menyatakan bahwa peningkatan belanja daerah, terutama yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan memperluas basis pajak dan retribusi daerah, sehingga berdampak pada peningkatan PAD. Dengan demikian, terdapat hubungan tidak langsung antara belanja daerah dan PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 3. Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024 (ribuan rupiah)

Kabupaten /Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sambas	1.835.021.133	1.854.895.554	1.704.454.437	1.888.255.229	1.811.797.985
Kabupaten Bengkayang	1.001.490.485	1.070.345.023	1.182.320.493	1.275.611.172	1.099.932.319
Kabupaten Landak	1.377.561.880	1.285.616.142	1.310.564.886	1.365.089.478	1.372.579.283
Kabupaten Mempawah	1.018.061.276	857.914.094	1.014.077.736	1.065.109.253	1.132.331.959

Kabupaten /Kota	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sanggau	1.590.584.161	1.296.485.705	1.602.519.411	1.717.381.512	1.770.804.557
Kabupaten Ketapang	2.348.730.049	1.953.447.854	2.147.760.381	2.421.986.192	2.445.086.951
Kabupaten Sintang	2.064.531.362	1.860.072.209	1.656.179.346	1.478.056.919	2.022.918.659
Kabupaten Kapuas Hulu	1.805.354.473	1.744.613.136	1.520.497.151	1.711.410.700	1.813.086.773
Kabupaten Sekadau	885.050.838	700.634.475	847.567.605	761.062.309	948.057.076
Kabupaten Melawi	1.178.488.784	1.103.871.885	1.025.041.965	1.041.062.858	1.115.846.197
Kabupaten Kayong Utara	750.229.553	822.833.298	730.880.435	822.367.392	784.568.005
Kabupaten Kubu Raya	1.580.265.429	1.658.062.567	1.568.201.052	1.549.639.381	1.713.642.691
Kota Pontianak	1.617.630.807	1.638.258.591	1.544.226.984	1.705.137.526	1.927.399.580
Kota Singkawang	869.159.954	1.053.654.023	808.555.403	1.012.357.695	932.689.975

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 (diolah)

Data diatas menunjukkan kecenderungan berfluktuasi, sedangkan jika dilihat dari data PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah tidak selalu diikuti oleh peningkatan PAD secara langsung pada periode yang sama, karena efektivitas belanja pemerintah bergantung pada kualitas pengelolaan anggaran, prioritas pembangunan, dan kemampuan belanja tersebut dalam mendorong aktivitas ekonomi. Secara teori, hal ini sejalan dengan Teori Keuangan Publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2004), yang menyatakan bahwa belanja daerah merupakan instrumen pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik dan pembangunan yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut tercermin dalam kenaikan PDRB, yang selanjutnya dapat memperluas basis penerimaan daerah sehingga mendorong peningkatan PAD. Oleh karena itu, hubungan antara belanja daerah, PDRB, dan PAD bersifat tidak langsung, di mana belanja daerah berperan sebagai salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebelum berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Belanja daerah merupakan komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di berbagai sektor. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, realisasi belanja daerah mengalami dinamika, terutama akibat adanya kebijakan prioritas anggaran pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut menyebabkan sebagian besar alokasi belanja daerah dialihkan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, sehingga berdampak pada berkurangnya anggaran di sektor lain yang bersifat produktif. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. PAD merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal daerah. Dengan mempertimbangkan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan belanja daerah sebagai faktor yang diduga mempengaruhi PAD, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap PAD di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

2. TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776) menjelaskan bahwa peningkatan kemakmuran suatu perekonomian berkaitan dengan peningkatan kemampuan produksi dan produktivitas. Smith menekankan pentingnya pembagian kerja (*division of labour*) dalam meningkatkan produktivitas sehingga dapat mendorong peningkatan hasil produksi dan kemakmuran ekonomi. Semakin berkembang kegiatan produksi dan semakin luas pasar, semakin besar pula aktivitas ekonomi yang terjadi dalam suatu wilayah (Smith, 1776).

Dalam konteks daerah, perkembangan aktivitas ekonomi tersebut dapat tercermin melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah. Peningkatan kegiatan ekonomi dapat memperluas basis penerimaan pemerintah daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber penerimaan lainnya. Dengan demikian, semakin berkembang perekonomian suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan yang dapat digali oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pemikiran tersebut, peningkatan PDRB dapat mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi dan potensi penerimaan daerah. Ketika kegiatan produksi, perdagangan, dan konsumsi mengalami peningkatan, basis penerimaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah juga semakin luas. Oleh karena itu, teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan bahwa peningkatan PDRB dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Teori *Fiscal Federalism* dikemukakan oleh Wallace E. Oates (1972) dalam bukunya *Fiscal Federalism* dan kemudian dikembangkan melalui esainya *An Essay on Fiscal Federalism* Oates (1999). Teori ini membahas pembagian kewenangan dan tanggung jawab fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran. Oates menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan dan karakteristik masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal dapat memungkinkan penyediaan barang dan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan serta mengalokasikan sumber daya berdasarkan kebutuhan dan kondisi daerah. Kewenangan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pengelolaan Belanja Daerah. Belanja Daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pembangunan lainnya. Pengalokasian belanja yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

2.2 Tinjauan Empiris

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengkaji pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah. Namun, hasil

penelitian tersebut menunjukkan temuan yang belum konsisten sehingga masih terdapat perbedaan mengenai pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB), belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Syahrif & Ningsih (2026) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kunjungan wisatawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar periode 2011–2024. Secara parsial, PDRB menjadi faktor dominan yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, sedangkan kunjungan wisatawan juga memberikan pengaruh positif namun dengan kontribusi yang lebih kecil dibandingkan PDRB. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah memiliki peranan utama dalam meningkatkan penerimaan daerah, sementara sektor pariwisata berfungsi sebagai faktor pendukung dalam mendorong optimalisasi PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh et al. (2025) menunjukkan bahwa secara simultan jumlah penduduk, PDRB, dan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 2016–2020. Namun secara parsial, jumlah penduduk dan pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan PDRB memiliki arah positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD di Jawa Timur lebih dipengaruhi oleh faktor demografi dan penerimaan pajak daerah dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB.

Penelitian yang dilakukan oleh Tajuddin & Kessi (2024) menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar tahun 2012–2021. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah serta optimalisasi pengeluaran pemerintah daerah mampu mendorong peningkatan penerimaan PAD. Selain itu, pembangunan infrastruktur melalui belanja daerah turut meningkatkan produktivitas masyarakat dan menarik investasi yang berdampak positif terhadap pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adika & Dwiputri (2021) menunjukkan bahwa secara simultan akomodasi pariwisata, jumlah rumah makan, PDRB, dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur. Namun secara parsial, akomodasi hotel berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah rumah makan, PDRB, dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah, terutama melalui sektor konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah daerah, mampu mendorong peningkatan PAD di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Juwita & Widia (2022) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis regresi linier sederhana terhadap data APBD tahun 2018–2019. Meskipun PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan maupun penurunan PDRB tidak secara langsung memengaruhi besarnya PAD. Hal ini menunjukkan bahwa PAD lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar PDRB, seperti pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan daerah lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Alifa & Nasir (2024) menunjukkan bahwa secara simultan PDRB, belanja daerah, jumlah wisatawan, dan jumlah objek wisata berpengaruh

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016–2022. Namun secara parsial, hanya belanja daerah yang berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan PDRB, jumlah wisatawan, dan jumlah objek wisata tidak berpengaruh terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah memiliki peran lebih dominan dalam meningkatkan PAD dibandingkan faktor ekonomi dan pariwisata lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2022) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta periode 2010–2019. Secara parsial, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan belanja daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan. Artinya, peningkatan aktivitas ekonomi daerah berperan penting dalam meningkatkan PAD, sementara belanja daerah belum memberikan pengaruh yang optimal terhadap penerimaan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aji (2023) menunjukkan bahwa PDRB, jumlah industri, jumlah penduduk, dan belanja daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Barat periode 2017–2021. Secara parsial, PDRB, jumlah industri, dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan. Artinya, peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja daerah dapat mendorong kenaikan PAD, namun pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak produktif justru dapat menurunkan PAD.

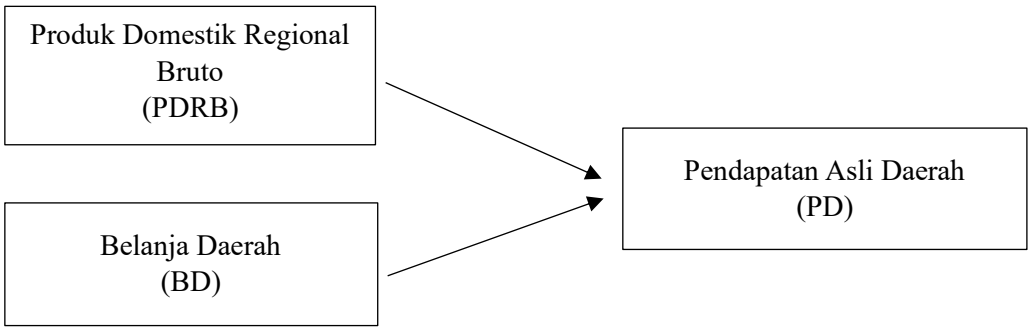
Penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Sumarni (2024) menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Asmara (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan retribusi daerah, belanja daerah, dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Secara bersamaan, seluruh variabel tersebut tetap memiliki pengaruh terhadap PAD. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pajak daerah menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan daerah, sedangkan efektivitas pengelolaan belanja daerah serta faktor ekonomi lainnya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap PAD.

2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui pengaruh pengaruh pdrb dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, maka disusunlah kerangka konseptual dengan pengaruh yang dinyatakan sesuai pada arah anak panah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2.3.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini belum dibuktikan secara empiris, karena didasarkan pada teori yang telah disesuaikan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka konseptual, berikut merupakan hipotesis atau hasil sementara yang menjadi dasar pemikiran dari penelitian:

H_1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

H_2. Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kausalitas. Objek pada penelitiaan ini adalah 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dengan kurun waktu 10 tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan berbentuk data panel, yaitu gabungan antara data runtun waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Data time series yang digunakan mencakup periode tahun 2015 sampai dengan 2024, sedangkan data *cross section* terdiri atas 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi PDRB, belanja daerah, dan pendapatan asli daerah.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, sedangkan variabel independennya yaitu PDRB dan belanja daerah.

Definisi operasional serta pengukuran masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam satu periode tertentu. Dalam penelitian ini, PAD diukur berdasarkan total realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun. Satuan yang digunakan adalah rupiah (juta/miliar rupiah). Data PAD bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1) merupakan total nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah selama periode tertentu yang menggambarkan aktivitas perekonomian daerah. Dalam penelitian ini, PDRB diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kalimantan Barat per tahun. Penggunaan PDRB ADHK dimaksudkan untuk menggambarkan nilai produksi berdasarkan harga pada tahun dasar sehingga perubahan nilai PDRB lebih mencerminkan perubahan volume produksi. Satuan yang digunakan adalah miliar rupiah. Data PDRB bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat.
3. Belanja Daerah (BD) (X_2) merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat dalam suatu tahun anggaran. Dalam penelitian ini, Belanja Daerah diukur berdasarkan total realisasi belanja daerah Provinsi Kalimantan Barat per tahun. Satuan yang digunakan adalah ribuan rupiah. Data Belanja Daerah bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis yaitu Eviews 14. Adapun model estimasi yang digunakan dalam persamaan pengaruh PDRB dan belanja daerah terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut :

$$\boldsymbol{log}\mathbf{PD}_{\boldsymbol{it}} = \boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}_1\boldsymbol{log}\mathbf{RB}_{\boldsymbol{it}} +\boldsymbol{\beta}_2\boldsymbol{log}\mathbf{BD}_{\boldsymbol{it}} +\boldsymbol{e}_{\boldsymbol{it}}$$

Keterangan:

PD_{it}	: Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota *i* pada tahun *t*
Log	: Logaritma
RB_{it}	: Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota *i* pada tahun *t*
BD_{it}	: Belanja Daerah kabupaten/kota *i* pada tahun *t*
α	: Konstanta
β_1, β_2	: Koefisien Regresi
e_{it}	: Error

Dalam penelitian ini menggunakan data panel, terdapat tiga pendekatan model regresi yang dapat digunakan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) (Ghozali, 2021).

Common Effect Model (CEM) merupakan pendekatan yang menganggap bahwa karakteristik setiap unit observasi relatif sama, baik dalam dimensi individu maupun waktu. Pada model ini, perbedaan karakteristik antarunit tidak diperhitungkan secara khusus. Oleh karena itu, CEM memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kondisi data apabila terdapat perbedaan karakteristik yang cukup besar antarunit observasi.

Fixed Effect Model (FEM) mengasumsikan bahwa terdapat karakteristik khusus pada masing-masing unit observasi yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan karakteristik tersebut dianggap tetap selama periode pengamatan dan dapat dikontrol melalui efek individu. Keterbatasan FEM adalah estimasinya relatif lebih kompleks serta kurang sesuai untuk mengestimasi variabel yang nilainya tidak berubah dari waktu ke waktu.

Random Effect Model (REM) mengasumsikan bahwa perbedaan karakteristik antarunit observasi bersifat random atau acak. Perbedaan tersebut kemudian direpresentasikan melalui komponen error dalam model. Pendekatan ini memungkinkan variasi antarunit dan antarperiode dimasukkan ke dalam unsur kesalahan sehingga dapat digunakan untuk mengestimasi pengaruh variabel dalam model data panel.

Penentuan model regresi data panel yang paling tepat dilakukan melalui beberapa pengujian, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (Ghozali, 2021).

Uji Chow digunakan untuk menentukan pilihan antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Dasar pengambilan keputusan dilihat dari nilai probabilitas. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka CEM dinilai lebih tepat digunakan. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah FEM.

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang lebih sesuai. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka REM menjadi model yang dipilih. Sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka FEM dianggap lebih tepat untuk digunakan.

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model yang lebih sesuai antara *Common Effect Model* dan *Random Effect* Model. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka Random Effect Model dipilih. Sementara itu, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka *Common Effect Model* yang digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, data akan dievaluasi menggunakan regresi linier berganda. Pengujian statistik yang melibatkan analisis regresi memerlukan perhatian agar tidak melanggar asumsi-asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengidentifikasi apakah sebaran data dari variabelvariabel penelitian mengikuti pola distribusi normal. Sebuah model regresi yang berkualitas ditandai dengan data yang terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Salah satu dasar yang dapat digunakan adalah nilai signifikan. Apabila nilai signifikan berada di bawah 0,05, maka model tidak menunjukkan adanya data tidak normal. Sebaliknya, nilai signifikan yang melebihi 0,05 dapat menjadi indikasi adanya masalah data tidak normal.

2. Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat antarvariabel independen dalam model penelitian. Salah satu dasar yang dapat digunakan adalah nilai korelasi antarvariabel. Apabila nilai korelasi antarvariabel independen berada di bawah 0,85, maka model tidak menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas yang kuat. Sebaliknya, nilai korelasi yang melebihi 0,85 dapat menjadi indikasi adanya masalah multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Model dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas atau signifikansinya lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, apabila nilai tersebut kurang dari 0,05, terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan keterkaitan antara nilai residual pada pengamatan saat ini dengan nilai residual pada pengamatan sebelumnya (t–1) dalam model regresi linier. Apabila keterkaitan seperti itu ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut mengandung masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) sebagai instrumen untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada residual model. Statistik Durbin-Watson menghasilkan nilai antara 0 hingga 4, di mana nilai yang mendekati 2 mengindikasikan tidak adanya autokorelasi. Suatu model dapat dinyatakan tidak mengalami autokorelasi apabila nilai DW berada di antara batas atas (du) dan nilai 4–du, 19 yaitu du < DW < 4–du, yang mengindikasikan bahwa residual tidak memiliki korelasi satu sama lain dan tidak membentuk pola sistematis.

Setelah menentukan model terbaik dan uji asumsi klasik selanjutnya dilakukan pengujian statistik sebagai berikut (Ghozali, 2021).

1. Uji Parsial (Uji t)

Digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi 5 persen (0,05). Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan variabel independen tersebut dinyatakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dinyatakan tidak signifikan.

2. Uji Simultan (Uji F)

Digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai probabilitas pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak yang berarti variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak dan variabel independen secara bersama-sama tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan.

3. Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Digunakan untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menerangkan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai Adjusted R^2 berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Semakin besar nilai Adjusted R^2 dan semakin mendekati angka 1, semakin besar pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen relatif rendah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Model

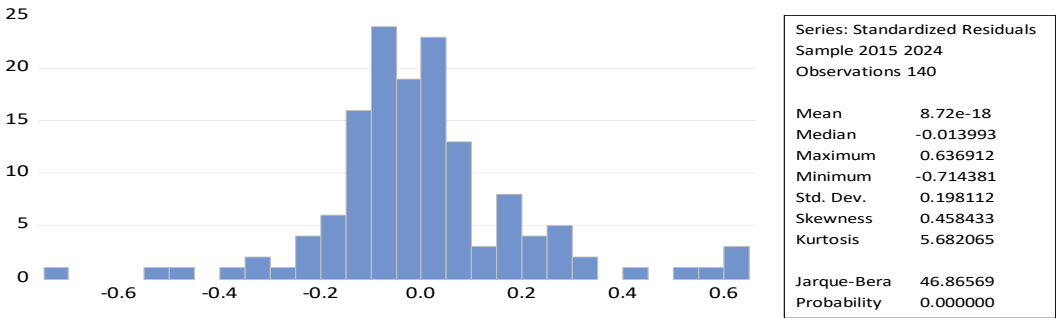
Berdasarkan Tabel 4,1, Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Selanjutnya, hasil Uji Hausman juga menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang juga lebih kecil dari 0,05, sehingga model FEM lebih tepat digunakan dibandingkan *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan kedua pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4. Hasil Uji Pemilihan Model

Uji	Prob	Hasil
Uji Chow	0,0000	FEM
Uji Hausman	0,0000	FEM

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 14

4.1.2 Uji Asumsi Klasik



Gambar 2. Uji Normalitas

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 14

Pada Gambar 2 hasil menunjukkan bahwa nilai nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 46.86569 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan jika data yang dianalisis dan layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

	LOGPDRB	LOGBD
LOG PDRB	1.000000	0.506580
LOGBD	0.506580	1.000000

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 14

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian multikolineritas menunjukkan bahwa nilai korelasi antarvariabel independen tersebut berada di bawah batas kritis 0,85. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model penelitian. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coeficient	Prob
C	0.514115	0.8652
LogPDRB	-0.037555	0.7164
LogBelanja_Daerah	0.026493	0.2088

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 14

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 6, menunjukkan seluruh nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model penelitian telah memenuhi asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	**1.460948**
Durbin-Watson stat AR(1)	**2.257480**

Berdasarkan hasil estimasi, Uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson menghasilkan nilai sebesar 1,460948. Dengan jumlah variabel independen (k) = 2 dan sampel (n) = 140, diperoleh nilai DL = 1,6950 dan DU = 1,7529. Nilai Durbin-Watson kurang dari nilai DU dan DL, sehingga hasil uji menunjukkan terjadi autokorelasi. Menurut Rauf et al. (2021), ketika terjadi autokorelasi pada uji, diperlukan metode estimasi yang mampu mengatasi adanya korelasi tersebut, salah satunya melalui pendekatan yang mempertimbangkan gangguan autoregresif AR(1). Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan estimasi ulang dengan memasukkan komponen AR(1) untuk mengatasi permasalahan autokorelasi pada model. Penggunaan AR(1) dimaksudkan agar korelasi residual pada periode berjalan dengan periode sebelumnya dapat diperhitungkan dalam proses estimasi. Setelah dilakukan estimasi AR(1), model kemudian diuji kembali untuk mengetahui apakah permasalahan autokorelasi telah teratasi.

4.1.3 Analisis Regresi Data Panel

Tabel 8. Hasil Estimasi Model Data Panel

Variabel	Coefficient	Probabilitas	Kesimpulan	Arah Hubungan
C	-31.74898	0.0000	Signifikan	Negatif
LOG(PDRB)	1.970735	0.0000	Signifikan	Positif
LOG(Belanja_Daerah)	- 0.051322	0.1157	Tidak Signifikan	Negatif
R-Squared	0.930748			

Adjusted R squared	0.922371
F-statistic	111.1047
Prob (F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 14

Dari hasil estimasi di atas, maka dapat dibuat model regresi data panel sebagai berikut

$$\mathbf{Log(PAD)_{it} = 8.736567 + 1.970735\ Log(PDRB)_{it} - 0.051322\ Log(BD)_{it} + e_{it}}$$

Dari persamaan fungsi regresi linear, maka dapat diinterprestasikan sebagai berikut:

a) Konstanta sebesar 8,736567 menunjukkan nilai Log(PAD) ketika variabel PDRB dan Belanja Daerah (BD) dianggap konstan atau bernilai nol. Dengan demikian, apabila tidak terdapat pengaruh dari variabel PDRB dan Belanja Daerah, maka nilai Log(PAD) diperkirakan sebesar 8,736567.
b) Koefisien PDRB sebesar 1.970735 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar 1%, maka PAD akan meningkat sebesar 1,970735%, dengan asumsi variabel Belanja Daerah tetap (*ceteris paribus*).
c) Koefisien belanja daerah (BD) sebesar -0,051322 Setiap kenaikan Belanja Daerah sebesar 1%, maka PAD akan menurun sebesar -0,051322%, dengan asumsi variabel PDRB tetap (*ceteris paribus*).

4.1.5 Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Tabel 4. 1 hasil uji Signifikasi Individual (Uji t)

Variabel	Coefficient	t- Statistic	Prob	Kesimpulan
LOGPDRB	1,970735	12,36513	0,0000	Signifikan
LOGBelanja Daerah	-0,051322	-1,584296	0,1157	Tidak Signifikan

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 14

Data menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan nilai t tabel sebesar 1,977304 adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah

   Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 12,36513 yang lebih besar dari t tabel (1,977304) dengan nilai signifikansi 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan asli daerah.

b. Pengaruh Belanda Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

   Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,584296 yang lebih kecil dari t tabel (1,977304) dengan nilai signifikansi 0,1157 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti H_1 ditolak dan H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah.

4.1.6 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 4. 2 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

F-statistic	111,1047
Prob(F-statistic)	0,000000

Sumber: Diolah menggunakan Eviews 14

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 111,1047 yang lebih besar dari F tabel (3,062204) dengan nilai signifikansi 0,000000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB dan Belanja Daera secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli daerah.

4.1.7 Uji koefisien determinasi (R^2)

Tabel 4. 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-Squared	0,930748
Adjusted R-Squared	0,922371

Sumber: Diolah menggunakan Eviews 14

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0,922371 atau 92,2371% menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PDRB dan Belanja Daerah mampu menjelaskan variasi pendapatan asli daerah sebesar 92,2371%, sedangkan sisanya sebesar 7,7629% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM), diperoleh nilai koefisien variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1,970735 dengan nilai probabilitas 0,0000 < 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan PDRB sebesar 1 persen akan meningkatkan PAD sebesar 1,970735 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).

Temuan penelitian ini sejalan dengan Teori Keuangan Publik yang digunakan dalam penelitian. Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB dapat memperbesar kapasitas fiskal daerah. Semakin tinggi aktivitas produksi, konsumsi, dan transaksi ekonomi yang terjadi di suatu wilayah, maka semakin besar pula potensi penerimaan pemerintah daerah dari berbagai sumber

PAD. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Syahrif & Ningsih, (2026) yang menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, di mana PDRB menjadi faktor dominan dalam meningkatkan PAD. Selain itu, penelitian Aji, (2023) juga menemukan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat. Temuan-temuan tersebut memperkuat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan asli daerah.

Kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa peningkatan PDRB selama periode penelitian diikuti dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat pada berbagai sektor, seperti perdagangan, industri pengolahan, jasa, pertanian, dan sektor lainnya. Meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut berdampak pada bertambahnya objek pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah perlu terus ditingkatkan agar mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah.

4.2.2 Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model (FEM), diperoleh nilai koefisien variabel Belanja Daerah sebesar -0,051322 dengan nilai probabilitas 0,1157 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Belanja Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD tidak dapat diterima. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan Belanja Daerah sebesar 1 persen cenderung menurunkan PAD sebesar 0,051322 persen, dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*). Namun demikian, karena pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, maka perubahan Belanja Daerah belum mampu menjelaskan perubahan PAD secara nyata pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode penelitian.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan Belanja Daerah belum sepenuhnya diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah. Sebagian besar belanja daerah kemungkinan masih didominasi oleh belanja operasional dan belanja pegawai yang lebih berorientasi

pada penyelenggaraan pemerintahan dibandingkan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru. Akibatnya, peningkatan pengeluaran pemerintah daerah belum mampu meningkatkan penerimaan PAD secara optimal.

Temuan penelitian ini belum sepenuhnya sesuai dengan Teori Keuangan Publik yang digunakan dalam penelitian. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa belanja daerah merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik. Belanja daerah yang dialokasikan secara efektif pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya memperluas basis penerimaan daerah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena manfaat dari belanja daerah umumnya memerlukan waktu yang relatif panjang untuk menghasilkan peningkatan penerimaan daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun program pemberdayaan ekonomi tidak serta-merta meningkatkan PAD pada tahun yang sama, melainkan memerlukan proses hingga mampu mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas basis pajak daerah. Selain itu, efektivitas pengelolaan belanja daerah juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahman & Sumarni (2024) yang menunjukkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kesamaan kedua penelitian terletak pada tidak signifikannya pengaruh belanja daerah terhadap PAD. Namun, terdapat perbedaan pada arah pengaruhnya, di mana Rahman & Sumarni (2024) menemukan pengaruh positif tetapi tidak signifikan, sedangkan penelitian ini menemukan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat belum mampu mendorong peningkatan PAD secara optimal, yang kemungkinan dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan dan alokasi belanja daerah.

Pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, peningkatan belanja daerah selama periode penelitian belum mampu secara langsung meningkatkan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dibelanjakan pemerintah daerah, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan

anggaran, ketepatan sasaran program pembangunan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat periode 2015–2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga PDRB sebagai cerminan kapasitas ekonomi daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi daerah mampu memperluas basis pajak dan retribusi daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya secara mandiri.
2. Belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, karena manfaatnya bersifat jangka panjang dan belum langsung mendorong peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal dan penerimaan PAD, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kemandirian fiskal masih memerlukan waktu serta bergantung pada efektivitas alokasi belanja daerah pada sektor-sektor produktif.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan seperti perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan jasa. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut dapat memperluas basis pajak dan retribusi daerah sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan belanja daerah, terutama dengan mengarahkan alokasi anggaran pada sektor-sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan PAD di masa mendatang.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi PAD, seperti jumlah penduduk, investasi, pajak daerah, retribusi daerah, tingkat inflasi, atau jumlah wisatawan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

RUJUKAN PUSTAKA

Adika, N. D., & Dwiputri, I. N. (2021). Pengaruh akomodasi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan*, *1*(6), 600–614. https://doi.org/10.17977/um066v1i62021p600-614

Ahmad Rizky Kesuma, F. A. R., Astafira, I., Afriani, N., Fadlirhohim, R. D., & Tri Septi Ayu Lestari, S. (2024). Pemodelan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia Periode 2018-2021 dengan Analisis Regresi Data Panel. *Journal of Statistics and Its Application*, *5*(2), 216–229.

Aji, G. B. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, Dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2017-201. *Jurnal AKTUAL*, *21*(1), 1–8.

Alifa, Z. N., & Nasir, M. S. (2024). Analisis Pengaruh PDRB , Belanja Daerah , Jumlah Wisatawan , dan Jumlah Objek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 -2022. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(11), 257–262.

Amsyah, U., & Sudardi. (2025). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi*, *3*(1), 14–27.

Arifin, Z. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2010-2019 Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Aparatur*, *4*(1), 397–405.

Arifiyanto, M. F., Supriyanto, & Widodo, M. H. (2026). Pengaruh Sektor Pertanian Dan Sektor Perdagangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *4*(1), 271–284.

Azizah, R. N. L., & Asmara, K. (2023). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Belanja Daerah , Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *9*(5), 1943–1954.

Fajerin, M. (2018). Tata Kelola Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010-2016. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, *4*(3), 361–376.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hartoyo, Putra, A., Fahmi, A., & Nurkodri, M. S. (2025). Analysis of the Effect of Gross Regional Domestic Product and Regional Expenditure on Local Own-Source Revenue in Jambi City. *Jurnal Prajaiswara*, *6*(2), 540–553. https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v6i2.218

Irwadi, M., Irsan, Winarni, S., & Vanessa. (2024). Analisis Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukai Abab Lematang Ilir. *Jurnal Sustainability: Riset Akuntansi*, *2*(1), 69–88.

Juliansyah, H., & Sulkadria. (2018). Pengaruh Total Penduduk Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, *01*(2), 58–64.

Juwita, R., & Widia, A. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Land Journal*, *3*(1), 69–76. https://doi.org/https://doi.org/10.47491/landjournal.v3i1.1750

Kobandaha, R., & Wokas, H. R. N. (2016). Analisi Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal Emba*, *4*(1), 1461–1472.

Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Mardiasmo (ed.); 3rd ed.). ANDI.

Munawaroh, B., Wahyuni, A., & Pradana, A. H. (2025). Pengaruh Jumlah Penduduk , PDRB dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur. *Journal Of Economics And Business Research*, *5*(1), 111–124. https://doi.org/10.21154/niqosiya.v5i1.4570

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Oates, W. E. (1999). Fiscal Federalism and European Economic Integration. *Fiscal Federalism and European Economic Integration*, *XXXVII*, 1–200. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203987254

Rahman, Z., & Sumarni. (2024). Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, *7*(1), 1183–1193.

Rauf, R. I., Ifeyinwa, O. J., & Yahaya, H. U. (2021). Robustness Test of Selected Estimators of Linear Regression with Autocorrelated Error Term : A Monte-Carlo Simulation Study. *Asian Journal of Probability and Statistics*, *15*(2), 1–17. https://doi.org/10.9734/AJPAS/2021/v15i230348

Rizqan, S., & Murtala. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto Dan Belanja Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, *6*(3), 31. https://doi.org/10.29103/jeru.v6i3.15182

Rosmadayanti, D., Imaningsih, N., & Wijaya, R. S. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, *2*(8). https://doi.org/https://doi.org/10.46799/jsa.v2i8.284

Smith, A. (1776). *An Inquairy Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. *1*, 1–462.

Sugandi, A., Nariyah, H., & Nursahidin. (2024). Pengaruh Kebijakan Belanja Daerah terhadap Efektivitas Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *5*(12), 1939–1949.

Syahrif, A., & Ningsih, S. K. (2026). Analisis Pengaruh PDRB dan Kunjungan Wisatawan Terhadap PAD (Periode 2011-2024). *Journal of Trends Economics and Accounting Reseacrh*, *6*(3), 478–487. https://doi.org/10.47065/jtear.v6i3.2577

Tajuddin, I., & Kessi, A. M. F. (2024). Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah di Kota Makassar Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, *7*(1), 575–587. https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1385 Analisis

LAMPIRAN

Lampiran 1. Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, PDRB Atas Dasar Harga Konstan, Total Belanja Daerah (ribuan rupiah) Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 2015-2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PDRB	Belanja daerah
1	KAB. SAMBAS	2015	85.577.887	11.226.270.000	1.511.634.278
2		2016	102.059.036	11.813.970.000	1.421.885.401
3		2017	200.322.598	12.411.930.000	1.638.897.259
4		2018	127.663.391	13.023.680.000	1.701.221.066
5		2019	148.846.280	13.641.740.000	1.835.021.132
6		2020	129.676.505	13.363.520.000	1.835.021.133
7		2021	148.139.104	13.948.120.000	1.854.895.554
8		2022	167.639.410	14.594.780.000	1.704.454.437
9		2023	230.889.069	15.278.390.000	1.888.255.229
10		2024	229.120.842	16.000.860.000	1.811.797.985
11	KAB. BENGKAYANG	2015	39.464.149	4.649.500.000	1.063.661.124
12		2016	42.677.133	4.889.160.000	899.326.378
13		2017	45.592.829	5.163.900.000	1.089.672.442
14		2018	50.525.048	5.434.860.000	1.003.654.006
15		2019	51.957.360	5.714.300.000	1.001.490.485
16		2020	54.405.431	5.600.320.000	1.001.490.485
17		2021	62.813.128	5.842.930.000	1.070.345.023
18		2022	83.744.526	6.161.450.000	1.182.320.493
19		2023	82.011.589	6.449.880.000	1.275.611.172
20		2024	84.083.058	6.755.970.000	1.099.932.319
21	KAB. LANDAK	2015	46.772.922	5.763.420.000	1.232.873.382
22		2016	57.178.240	6.067.560.000	1.134.061.048
23		2017	124.368.521	6.381.210.000	1.288.441.668
24		2018	78.978.743	6.694.980.000	1.316.910.324
25		2019	92.870.330	7.022.010.000	1.377.561.880
26		2020	104.639.965	6.972.050.000	1.377.561.880
27		2021	113.438.339	7.312.660.000	1.285.616.142
28		2022	73.275.181	7.652.350.000	1.310.564.886
29		2023	62.613.089	7.988.200.000	1.365.089.478
30		2024	65.769.536	8.351.060.000	1.372.579.283
31	KAB. MEMPAWAH	2015	54.181.326	4.175.720.000	980.161.198
32		2016	65.094.642	4.425.720.000	882.041.759
33		2017	71.799.025	4.685.370.000	967.255.039

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PDRB	Belanja daerah
34		2018	75.774.088	4.955.360.000	1.015.277.056
35		2019	87.577.543	5.241.750.000	1.018.061.276
36		2020	98.615.211	5.251.040.000	1.018.061.276
37		2021	107.445.076	5.466.320.000	857.914.094
38		2022	154.466.054	5.723.030.000	1.014.077.736
39		2023	148.988.046	6.014.540.000	1.065.109.253
40		2024	147.446.161	6.412.730.000	1.132.331.959
41	KAB. SANGGAU	2015	83.710.929	11.047.180.000	1.362.317.621
42		2016	93.326.584	11.636.870.000	1.663.612.737
43		2017	151.917.753	12.157.880.000	1.535.396.866
44		2018	117.497.968	12.670.000.000	1.500.872.589
45		2019	117.494.362	13.142.290.000	1.590.584.161
46		2020	117.923.983	13.235.260.000	1.590.584.161
47		2021	129.732.909	13.790.450.000	1.296.485.705
48		2022	158.524.816	14.425.580.000	1.602.519.411
49		2023	159.171.290	14.719.800.000	1.717.381.512
50		2024	176.129.864	15.328.480.000	1.770.804.557
51	KAB. KETAPANG	2015	121.939.004	13.529.100.000	1.961.316.832
52		2016	134.597.766	14.607.930.000	1.849.286.999
53		2017	168.043.332	15.661.140.000	1.993.617.874
54		2018	190.356.708	16.887.780.000	2.118.372.563
55		2019	197.498.467	17.999.840.000	2.348.730.049
56		2020	231.283.286	17.911.870.000	2.348.730.049
57		2021	291.004.279	18.848.700.000	1.953.447.854
58		2022	225.476.782	19.876.460.000	2.147.760.381
59		2023	286.702.600	20.088.150.000	2.421.986.192
60		2024	260.639.132	21.070.690.000	2.445.086.951
61	KAB. SINTANG	2015	103.993.547	7.830.070.000	1.700.909.625
62		2016	108.405.524	8.243.740.000	1.481.302.835
63		2017	113.170.506	8.683.370.000	1.884.197.672
64		2018	240.581.937	9.130.730.000	1.870.318.612
65		2019	172.275.980	9.586.050.000	2.064.531.362
66		2020	134.829.357	9.375.710.000	2.064.531.362
67		2021	176.520.347	9.731.980.000	1.860.072.209
68		2022	162.366.717	10.215.010.000	1.656.179.346
69		2023	172.973.442	10.693.380.000	1.478.056.919
70		2024	179.044.685	11.216.500.000	2.022.918.659
71	KAB. KAPUAS HULU	2015	69.732.520	5.301.110.000	1.568.656.547
72		2016	67.135.520	5.580.750.000	1.421.570.043
73		2017	131.221.195	5.881.740.000	1.651.954.428
74		2018	76.001.253	6.155.950.000	1.722.177.313
75		2019	79.977.091	6.390.000.000	1.805.354.473
76		2020	79.165.078	6.234.480.000	1.805.354.473

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PDRB	Belanja daerah
77		2021	78.657.173	6.510.870.000	1.744.613.136
78		2022	70.668.854	6.804.580.000	1.520.497.151
79		2023	73.407.844	7.118.700.000	1.711.410.700
80		2024	92.298.147	7.457.750.000	1.813.086.773
81	KAB. SEKADAU	2015	33.509.610	3.432.930.000	782.931.409
82		2016	36.602.825	3.636.660.000	701.605.666
83		2017	72.775.859	3.848.260.000	833.960.296
84		2018	59.087.970	4.072.440.000	873.645.816
85		2019	45.360.926	4.294.120.000	885.050.838
86		2020	46.978.872	4.252.100.000	885.050.838
87		2021	45.142.192	4.435.320.000	700.634.475
88		2022	55.332.244	4.661.470.000	847.567.605
89		2023	67.029.293	4.880.320.000	761.062.309
90		2024	58.799.759	5.117.390.000	948.057.076
91	KAB.MELAWI	2015	29.938.549	2.809.300.000	926.731.141
92		2016	34.129.258	2.942.750.000	874.617.550
93		2017	67.202.756	3.081.200.000	976.598.432
94		2018	40.838.662	3.242.890.000	992.871.227
95		2019	40.577.160	3.385.820.000	1.178.488.784
96		2020	30.872.005	3.348.110.000	1.178.488.784
97		2021	56.170.124	3.500.140.000	1.103.871.885
98		2022	49.672.921	3.671.610.000	1.025.041.965
99		2023	46.569.007	3.838.950.000	1.041.062.858
100		2024	54.536.317	4.021.650.000	1.115.846.197
101	KAB.KAYONG UTARA	2015	13.182.872	2.062.070.000	639.404.411
102		2016	10.812.481	2.185.470.000	600.436.070
103		2017	36.486.218	2.302.840.000	792.645
104		2018	27.205.097	2.416.580.000	734.469.665
105		2019	28.597.868	2.536.740.000	750.229.553
106		2020	39.525.272	2.517.550.000	750.229.553
107		2021	34.406.955	2.632.990.000	822.833.298
108		2022	46.082.073	2.765.560.000	730.880.435
109		2023	49.778.428	2.889.470.000	822.367.392
110		2024	45.146.680	3.019.940.000	784.568.005
111	KAB. KUBU RAYA	2015	86.469.772	14.493.650.000	1.355.429.625
112		2016	101.310.299	15.416.530.000	1.268.528.115
113		2017	152.023.128	16.424.300.000	1.402.898.122
114		2018	184.531.275	17.287.110.000	1.538.247.121
115		2019	172.839.464	18.268.640.000	1.580.265.430
116		2020	151.009.789	17.831.730.000	1.580.265.429
117		2021	160.894.591	18.754.970.000	1.658.062.567
118		2022	200.314.166	19.783.110.000	1.568.201.052
119		2023	201.559.444	20.768.220.000	1.549.639.381

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PDRB	Belanja daerah
120		2024	253.234.841	21.794.060.000	1.713.642.691
121	KOTA PONTIANAK	2015	334.708.368	20.747.490.000	1.464.232.647
122		2016	389.368.654	21.801.140.000	1.415.266.992
123		2017	476.050.410	22.881.970.000	1.505.936.137
124		2018	440.358.120	23.846.670.000	1.605.564.262
125		2019	478.790.895	24.804.700.000	1.617.630.807
126		2020	403.176.699	23.822.510.000	1.617.630.807
127		2021	413.401.936	24.919.420.000	1.638.258.591
128		2022	537.797.748	26.159.520.000	1.544.226.984
129		2023	574.760.972	27.404.860.000	1.705.137.526
130		2024	593.775.840	28.784.470.000	1.927.399.580
131	KOTA SINGKAWANG	2015	98.264.325	5.639.570.000	825.055.174
132		2016	103.256.348	5.930.950.000	769.476.314
133		2017	132.099.419	6.250.020.000	808.804.807
134		2018	130.864.904	6.540.220.000	847.350.041
135		2019	166.200.436	6.828.390.000	869.159.954
136		2020	154.272.914	6.657.050.000	869.159.954
137		2021	181.244.700	6.977.770.000	1.053.654.023
138		2022	213.790.180	7.330.630.000	808.555.403
139		2023	244.316.899	7.694.930.000	1.012.357.695
140		2024	272.080.298	8.084.580.000	932.689.975
141	KALIMANTAN BARAT	2015	85.577.887	112.346.760	4.207.747.653
142		2016	102.059.036	118.183.270	4.320.618.793
143		2017	200.322.598	124.289.170	5.259.793.611
144		2018	127.663.391	130.596.320	5.341.404.835
145		2019	148.846.280	137.243.090	5.677.397.310
146		2020	129.676.505	134.743.380	6.582.879.812
147		2021	148.139.104	141.187.040	6.303.146.996
148		2022	167.639.410	148.368.940	5.726.991.913
149		2023	230.889.069	154.980.810	6.743.448.956
150		2024	229.120.842	162.574.470	6.272.475.107

Data LOG

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PDRB	Belanja daerah
1	KAB. SAMBAS	2015	25.17269277	30.04927768	28.04421248
2		2016	25.34881727	30.10030385	27.98300485
3		2017	26.02319489	30.14967922	28.12504473
4		2018	25.57266288	30.19779035	28.16236738
5		2019	25.72617993	30.24415533	28.23807711
6		2020	25.58830876	30.22354972	28.23807711
7		2021	25.72141756	30.26636585	28.24884951
8		2022	25.84508114	30.31168505	28.1642662

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PDRB	Belanja daerah
9		2023	26.16520321	30.35746053	28.26667436
10		2024	26.1575154	30.40366359	28.22534083
11	KAB. BENGKAYANG	2015	24.39865848	29.1677808	27.69273796
12		2016	24.4769291	29.21804163	27.52491185
13		2017	24.54301628	29.27271322	27.71689826
14		2018	24.64573504	29.32385488	27.63466846
15		2019	24.67368922	29.37399292	27.63251049
16		2020	24.71972983	29.35384485	27.63251049
17		2021	24.86342993	29.3962535	27.69900216
18		2022	25.15103664	29.44933326	27.79850014
19		2023	25.1301264	29.49508264	27.87444653
20		2024	25.15507093	29.54144767	27.72626977
21	KAB. LANDAK	2015	24.56857028	29.38255216	27.84036864
22		2016	24.76943924	29.43397766	27.75682615
23		2017	25.54651494	29.48437885	27.88445459
24		2018	25.09244457	29.53237911	27.90630945
25		2019	25.25447006	29.58007062	27.9513363
26		2020	25.37379139	29.57293042	27.9513363
27		2021	25.45452526	29.62062821	27.88225921
28		2022	25.01748779	29.66603391	27.90147937
29		2023	24.86024018	29.70898657	27.94224109
30		2024	24.90942259	29.75340959	27.94771277
31	KAB. MEMPAWAH	2015	24.71560215	29.06030791	27.61098288
32		2016	24.89910808	29.11845409	27.50550524
33		2017	24.99713674	29.175466	27.59772804
34		2018	25.05102223	29.23149093	27.64618265
35		2019	25.19579044	29.28767653	27.64892122
36		2020	25.31449135	29.28944727	27.64892122
37		2021	25.40024564	29.32962675	27.47776981
38		2022	25.76324019	29.3755195	27.64500068
39		2023	25.72713191	29.42520099	27.69409849
40		2024	25.71672894	29.48930619	27.7553003
41	KAB. SANGGAU	2015	25.15063538	30.03319631	27.9402085
42		2016	25.25937084	30.08519962	28.1400127
43		2017	25.74660512	30.12899864	28.05981001
44		2018	25.48968687	30.17025811	28.03706778
45		2019	25.48965619	30.20685639	28.09512246
46		2020	25.49330604	30.2139056	28.09512246
47		2021	25.58874363	30.25499744	27.89067842
48		2022	25.78917698	30.30002414	28.10259814
49		2023	25.79324675	30.32021464	28.17182187
50		2024	25.89448742	30.36073365	28.20245511
51		2015	25.52678679	30.23586404	28.30463722

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PDRB	Belanja daerah
52	KAB. KETAPANG	2016	25.62555665	30.31258565	28.24582127
53		2017	25.84748771	30.3822036	28.32097213
54		2018	25.97216556	30.4576114	28.38166925
55		2019	26.00899666	30.52138398	28.48489589
56		2020	26.16690914	30.51648474	28.48489589
57		2021	26.39660381	30.56746506	28.30061706
58		2022	26.14148303	30.62055723	28.39544673
59		2023	26.38171128	30.6311512	28.51560906
60		2024	26.28640265	30.67890409	28.5251018
61	KAB. SINTANG	2015	25.36759468	29.68899257	28.1621843
62		2016	25.40914488	29.74047524	28.02394311
63		2017	25.45216142	29.79243082	28.26452321
64		2018	26.20632656	29.84266676	28.25712991
65		2019	25.87236356	29.89133003	28.35592437
66		2020	25.6272758	29.86914342	28.35592437
67		2021	25.89670199	29.90643849	28.25163642
68		2022	25.8131233	29.95487932	28.13553447
69		2023	25.87640391	30.00064597	28.02174945
70		2024	25.91090125	30.04840702	28.33556247
71	KAB. KAPUAS HULU	2015	24.96793262	29.29893735	28.08124067
72		2016	24.9299791	29.35034429	27.98278304
73		2017	25.60015025	29.40287375	28.1329802
74		2018	25.05401566	29.44844021	28.17461049
75		2019	25.10500607	29.48575538	28.22177807
76		2020	25.0948011	29.46111629	28.22177807
77		2021	25.08836466	29.5044942	28.18755395
78		2022	24.98127077	29.54861703	28.05005847
79		2023	25.01929663	29.59374624	28.16833912
80		2024	25.2482899	29.64027488	28.22605191
81	KAB. SEKADAU	2015	24.23509809	28.86443524	27.38631093
82		2016	24.32339127	28.92208679	27.27663735
83		2017	25.01065013	28.97864221	27.44945163
84		2018	24.80229318	29.03526344	27.49594089
85		2019	24.53791692	29.08826776	27.50891092
86		2020	24.57296381	29.07843409	27.50891092
87		2021	24.53308316	29.12062088	27.27525215
88		2022	24.73662165	29.17035196	27.46563644
89		2023	24.92839558	29.21623191	27.35798107
90		2024	24.79740359	29.26366566	27.57768054
91	KAB.MELAWI	2015	24.12241275	28.66395646	27.55492933
92		2016	24.25342085	28.71036563	27.49705254
93		2017	24.9309801	28.75634025	27.60734138
94		2018	24.43289508	28.80748602	27.62386681

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PDRB	Belanja daerah
95		2019	24.42647119	28.85061724	27.79525404
96		2020	24.15311561	28.83941712	27.79525404
97		2021	24.75165086	28.88382408	27.72984501
98		2022	24.62872577	28.93165137	27.65575467
99		2023	24.56420107	28.97622001	27.67126329
100		2024	24.72213269	29.02271338	27.74063415
101	KAB.KAYONG UTARA	2015	23.30218426	28.35473145	27.18380297
102		2016	23.10396697	28.41285202	27.12092201
103		2017	24.32020043	28.46516426	20.49088601
104		2018	24.02667017	28.51337443	27.32241453
105		2019	24.07659802	28.56190091	27.34364507
106		2020	24.40020609	28.55430732	27.34364507
107		2021	24.26152456	28.5991412	27.43601946
108		2022	24.55368984	28.64826426	27.31751572
109		2023	24.63084756	28.69209421	27.43545308
110		2024	24.53318258	28.73625808	27.38839909
111	KAB. KUBU RAYA	2015	25.18306074	30.30473174	27.93513959
112		2016	25.34145391	30.36646143	27.86887838
113		2017	25.7472985	30.42978306	27.9695613
114		2018	25.9410848	30.48098225	28.06166465
115		2019	25.87562905	30.53620704	28.08861394
116		2020	25.7406105	30.51200057	28.08861394
117		2021	25.80401528	30.5624799	28.13667091
118		2022	26.0231528	30.61584966	28.08095025
119		2023	26.02935018	30.66444505	28.06904336
120		2024	26.25758312	30.71265857	28.16964245
121	KOTA PONTIANAK	2015	26.53652545	30.66344639	28.01235243
122		2016	26.68779243	30.71298338	27.97833932
123		2017	26.88878959	30.76137038	28.04043584
124		2018	26.81085414	30.8026657	28.10449638
125		2019	26.89452979	30.84205427	28.11198373
126		2020	26.72264076	30.80165205	28.11198373
127		2021	26.74768617	30.84666854	28.12465496
128		2022	27.01074839	30.89523429	28.06554457
129		2023	27.07722009	30.94174149	28.16466688
130		2024	27.10976771	30.99085712	28.28719284
131	KOTA SINGKAWANG	2015	25.31092688	29.36082894	27.4387161
132		2016	25.36048055	29.41120552	27.36897601
133		2017	25.60682065	29.46360578	27.41882345
134		2018	25.59743136	29.50899192	27.46537972
135		2019	25.83646034	29.55211004	27.49079301
136		2020	25.76198904	29.52669756	27.49079301
137		2021	25.92311389	29.5737505	27.68328526

No	Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PDRB	Belanja daerah
138		2022	26.0882609	29.62308258	27.41851504
139		2023	26.22173199	29.67158279	27.64330308
140		2024	26.32936307	29.72097966	27.56133869

Lampiran 2. Hasil Uji

Uji chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

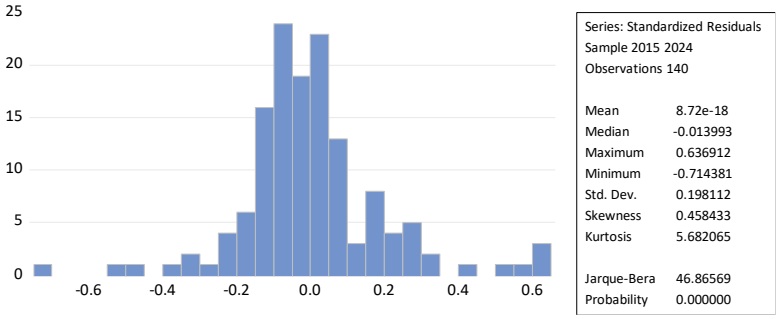
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	20.560894	(13,124)	0.0000
Cross-section Chi-square	160.884016	13	0.0000

uji hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	23.544868	2	0.0000

uji normalitas



uji multikolinearitas

	LOG(PDRB)	LOG(BELA...
LOG(...	1.000000	0.506580
LOG(...	0.506580	1.000000

uji heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)